

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Agustinus, Leo.2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- Joko Widodo, M.S. (2007). Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media.
- Rynt Nugroho Dwijowijato. 2003, Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, Jakarta.Elex Media komputindo.
- Said Zainal Abidin, Ph. D. MPIA. 2016. Kebijakan Publik, Penerbit Salemba Humanika.
- Subarsono,Ag.2016.Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta,Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta,CV.

2.JURNAL

- Alfiana Ekasari. 2014. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.
- Brianto Putra Tama. 2019.Izin Mendirikan Bangunan.
- Esti Nuryana. 2016. Implementasi Kebijakan Publik tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar
- Faizal Madya.2028. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor
- Lukman Arief. 2008. Implementasi Kebijakan perda No 7 Tahun1992 (Tentang IMB Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya
- Muhammad Darwis Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPSP&PMD) Kabupaten Mamuju Utara
- Niza Syahputra.,2017, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai
- Ronaldo Ruland kindangen,dkk. 2018 Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
- Umbu Lapu Ngunjunau. 2015. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sumba

2. Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Bangunan

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 Tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan (IMB)

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu